



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI BANTEN
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022 - 2023**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III/ F-P. P. NASDEM
2.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S. H., M. Hum	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
3.	Dr. HABIBURROKHMAN, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
4.	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
5.	Drs. M. NURDIN, M.M	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
6.	H. AGUSTIAR SABRAN, S. Kom	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
7.	I WAYAN SUDIRTHA, S.H	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
8.	IR. HJ. SARI YULIATI, M.T	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
9.	SUPRIANSA, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
10.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
11.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M. Hum.	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
12.	AHMAD H. M. ALI, S.E	ANGGOTA/F-P. NASDEM
13.	H. MOH. RANO AL-FATH, S. G., M. H	ANGGOTA/F-PKB
14.	Dr. DIDIK MUKRIANTO, S. H., M.H	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
15.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
16.	Dr. SAFARUDDIN SUDING, S.H., M.H	ANGGOTA/F-PAN
17.	HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E	ANGGOTA/F-PKS

18.	Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PKS
19.	Dr. H. ARSUL SANI, S.H., M. Si	ANGGOTA/F-PPP

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Reses ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 di Provinsi Banten. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Banten.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Serang.
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Banten

Bidang Pengawasan

1. Dalam laporannya, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten melaporkan beberapa hal yang menjadi permohonan tindak lanjut terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kepolisian Daerah Banten, yaitu masih adanya satuan kewilayahan yang merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang namun belum masuk ke dalam daerah hukum Polda Banten. Dimana dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang yang terbagi menjadi 18 Polsek, baru hanya 10 Polsek yang masuk ke dalam daerah hukum Polresta Tangerang Polda Banten, yaitu:
 - a) Polsek Balaraja (Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sukamulya);
 - b) Polsek Cikupa (Kecamatan Cikupa);
 - c) Polsek Tiga Raksa (Kecamatan Tiga Raksa dan Kecamatan Jambe);
 - d) Polsek Cisoka (Kecamatan Cisoka, Kecamatan Solear dan Kecamatan Jayanti);
 - e) Polsek Mauk (Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Kaler);
 - f) Polsek Rajeg (Kecamatan Cikupa);
 - g) Polsek Kresek (Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukadiri);
 - h) Polsek Kronjo (Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekar Baru);
 - i) Polsek Pasar Kemis (Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Sindang Jaya);
 - j) Polsek Panongan (Kecamatan Panongan).
2. Adapun Polsek yang belum masuk ke dalam daerah hukum Polda Banten adalah:
 - a) Wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya
 - Polsek Pakuhaji (Kecamatan Pakuhaji);
 - Polsek Teluk naga (Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi);

- Polsek Sepatan (Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur).
- b) Wilayah hukum Polres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya
- Polsek Kelapadua (Kecamatan kelapadua);
 - Polsek Legok (Kecamatan Legok);
 - Polsek Pagedangan (Kecamatan Pagedangan)
 - Polsek Curug (Kecamatan Curug);
 - Polsek Cisauk (Kecamatan Cisauk).
3. Berikut merupakan rekap data tanah dan bangunan sarpras Polda Banten, yaitu:

Satker	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total
Polda Banten	1.178 unit	34.001 unit	1.212 unit

II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten

a. Bidang Anggaran

1. Pagu anggaran Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp134.142.191.000 dengan realisasi sebesar Rp61.925.625.222 atau sebesar 46,16%. Sedangkan target PNBP 2023 adalah sebesar Rp13.430.935.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp11.275.185.054 (83,94%). Adapun target PNBP di tahun 2024 sebesar Rp13.945.085.000. dimana terdapat kenaikan sebesar Rp514.150.000 atau sebesar 3,83% dari tahun sebelumnya.
2. Tambahan kebutuhan anggaran total Rp104.787.492.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penambahan biaya kegiatan/ perkara sebesar Rp90.238.092.000
 - b) Penambahan biaya operasional perkantoran sebesar Rp2.193.400.000
 - c) Penambahan biaya sarana dan prasarana sebesar Rp12.356.000.000
3. Pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp134.602.163.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp15.808.076.000
 - b) Program dukungan manajemen sebesar Rp118.794.087.000
4. Rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas adalah:
 - a) Program percepatan investasi (prioritas nasional 1);
 - b) Program penyelamatan aset negara (program prioritas nasional 5);
 - c) Penyediaan posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak (prioritas nasional 7);
 - d) Pendirian rumah restorative justice berbasis hukum adat (prioritas nasional 7);
 - e) Pembiayaan kegiatan direktif presiden (prioritas nasional 1,5 dan 7).

b. Bidang Pengawasan

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Terdapat 16 perkara tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah Banten yang menarik perhatian. Salah satunya adalah dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima tahun 2017 atas nama tersangka inisial BP. Proyek aplikasi fiktif ini menimbulkan kerugian keuangan negara

sebesar Rp17,7 miliar, dimana dalam hal ini PT. Sigma Cipta Caraka yang merupakan perusahaan terafiliasi BUMN.

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Terdapat 30 perkara tindak pidana umum se wilayah banten yang menarik perhatian penyelesaian tindak pidana umum dengan restorative justice sebesar 22 perkara. Adapun perkara tindak pidana umum yang menarik perhatian adalah perkara atas nama Alwi Huseun Maulana Bin Almarhum Anwari Husnira yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang. Terdakwa telah dituntut selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi 3 bulan kurungan. Dimana terdakwa melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nonmro 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang saat ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Kamis 13 Juli 2023 serta pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk menggunakan akses internet selama 8 (delapan) tahun.

Adapun penanganan perkara tindak pidana narkotika adalah, terdapat 14 perkara tindak pidana narkotika se wilayah Banten yang dituntut hukuman mati. Tuntutan maksimal terhadap para pelaku tindak pidana narkotika terutama bagi status pengedar dengan barang bukti yang banyak. Rehabilitasi dengan memanfaatkan balai rehabilitasi Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten di Rumah Sakit Provinsi Banten terhadap para terdakwa yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pemakai. Saat ini Balai Rehabilitasi Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten telah diisi pasien yang dieksekusi dari Kejaksaan Negeri Lebak atas nama Yayan Septian bin Sulaiman yang menjalani rehabilitasi selama 6 bulan.

3. Upaya membangun sinergitas koordinasi dan Kerjasama terpadu

a) Koordinasi secara formal

- Kejaksaan Tinggi Banten dengan instansi lain yaitu Polri, Inspektorat, BPKP, PPATK dan KPK terkait monev untuk percepatan penanganan perkara dan pertukaran informasi penanganan hasil audit APIP;
- Kejaksaan Tinggi banten (Bidang Pidum) forum koordinasi dengan penyidik (Polri, BNN dan PNNS) terkait penyelesaian penanganan perkara yang berlarut;
- Kejaksaan Tinggi se-wilayah Banten dengan Kepolisian Resor, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasayarkaatan masing-masing daerah dalam upaya penanganan perkara baik secara teknis dan administrasi.

b) Koordinasi secara informal

- Kegiatan turnamen tenis lapangan yang diikuti oleh Kejaksaan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banten sebanyak dua kali;
- Kejaksaan Tinggi banten telah mengundang Korem 064/ Maulana Yusuf untuk melakukan latihan tenis bersama pada Bulan Juni 2023.

III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten

a. Bidang Anggaran

1. Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Banten mendapat alokasi pagu sebesar Rp342.080.444.000 dengan realisasi anggaran hingga periode September 2023 sebesar Rp166.214.517.801 (48,59%) dengan rincian realisasi Kanwil Kemenkumham sebesar Rp16.411.565.408 (53,64%) dan realisasi 19

Satuan Kerja sebesar Rp149.802.952.395 (48,09%) dengan perincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Div Adm-Dukungan Manajemen	20.842.065.000	10.600.350.730	50,86%
Div Yankum-Adm Hukum Umum	2.260.316.000	1.291.590.280	57,14%
Div Yankum-Kekayaan Intelektual	1.730.303.000	1.082.620.531	62,57%
Div Yankum-Peraturan Perundang-Undangan	373.635.000	204.791.000	54,81%
Div Yankum-Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.344.210.000	1.433.625.000	61,16%
Div Yankum-HAM	235.484.000	146.249.350	62,11%
Div Yankum-Balitbang Kumham (Badan Strategi Kebijakan)	219.371.000	150.374.500	68,55%
Div Keimigrasian	1.801.192.000	1.059.022.015	58,80%
Div Pemasarakatan	788.886.000	442.942.000	56,15%
Realsisasi Anggaran Kanwil Banten	30.595.462.000	16.411.565.406	53,64%
LP Kls I Tangerang	95.381.061.000	30.270.489.866	31,74%
LP Kls IIA Pemuda Tangerang	45.460.571.000	24.150.631.984	53,12%
LP Perempuan Kls IIA Tangerang	11.816.674.000	6.051.703.306	51,21%
LP Kls IIA Tangerang	16.529.136.000	5.220.055.677	31,58%
LPKA Kls I Tangerang	8.881.883.000	5.036.200.792	56,70%
LP Terbuka Ciangir	5.404.275.000	2.894.354.145	53,56%
LP Kls II Serang	15.051.468.000	8.598.094.171	57,12%
LP Kls IIA Cilegon	23.810.144.000	13.548.420.331	56,90%
LP Kls III Rangkasbitung	6.007.282.000	3.952.160.245	65,79%
Rutan Kls I Tangerang	20.653.947.000	12.166.903.902	58,91%
Rutan Kls IIB Serang	12.040.785.000	7.380.265.406	61,29%
Rutan Kls IIB Pandeglang	7.606.554.000	3.979.152.090	52,31%
Bapas Tangerang	4.258.342.000	3.577.229.714	84,01%
Bapas Kls II Serang	4.156.805.000	2.810.939.453	67,62%
Bapas Kls II Ciangir	2.147.734.000	1.403.467.628	65,35%
Rupbanas Klas II Serang	2.693.039.000	1.462.487.021	54,31%
Kanim Kls I Tangerang	15.686.294.000	9.644.745.092	61,49%
Kanim Kls I Serang	7.138.872.000	4.399.340.156	61,63%
Kanim KLS II Cilegon	6.760.126.000	3.256.311.416	48,17%
Realisasi Anggaran Satuan Kerja	311.484.982.000	149.802.952.395	48,09%
Total Realisasi Anggaran Kumham Banten	342.080.444.000	166.214.517.801	48,59%

2. Target Kinerja dan PNBP Tahun 2023

Divisi Administrasi	10 Tarja
Divisi Pemasarakatan	9 Tarja
Divisi Keimigrasian	3 Tarja
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	17 Tarja

3. Kebutuhan anggaran tahun 2023 sebesar Rp6.667.602.540. Adapun target PNBP tahun 2023 adalah Rp61.563.172.000 dengan realisasi sebesar Rp68.326.568.731 (110,99%). Sedangkan pagu anggaran di tahun 2024 adalah Rp269.337.548.000 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp237.338.561.240. Adapun target PNBP di tahun 2024 adalah sebesar Rp70.154.173.000.

4. Program Prioritas Nasional Kemenkumham Tahun 2023 adalah:
- Peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 - Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukam) dan transformasi pelayanan publik. Adapun pelayanan publik yang sudah dilakukan adalah:

Jenis Bantuan Hukum	Jumlah Permohonan	Telah Pencairan
Litigasi	505	269
Non Litigasi	103	32
Total	608	301

5. Alokasi anggaran bantuan hukum (litigasi dan non litigasi) sebesar Rp1.205.020.000,-

b. Bidang Pengawasan

1. Penanganan Over Crowding di Lapas

- Pada tahun 2023 jumlah WBP yang berada di Lapas berjumlah 9.872 WBP yang terdiri dari Narapidana 7.837 WBP dan Tahanan 2.035 WBP. Sedangkan kapasitas hunian hanya untuk 5.393 WBP, maka terjadi overcapacity sebesar 83,05%.
- Data pemindahan narapidana ke Lapas/ Rutan dalam wilayah Banten maupun keluar wilayah banten adalah:

Tujuan Mutasi	Tahun 2022	Tahun 2023
Dalam wilayah Banten	1.889	703
Luar wilayah Banten	182	16

- Adapun pelaksanaan integrasi dan asimilasi rumah yang sudah dilakukan terhadap para WBP adalah:

Pembebasan Bersyarat (PB)	888
Cuti Bersyarat (CB)	51
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	17
Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	0
Asimilasi Rumah	919

- Periode tahun 2022 hingga 2023 telah dilaksanakan 20.395 remisi terhadap WBP, dengan pembagian di tahun 2022 sebanyak 14.063 dan tahun 2023 sebanyak 6.324.
- Optimalisasi Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir
Mendorong pengisian narapidana dari Lapas dan Rutan yang padat berdasarkan dari penilaian atau asesmen resiko. Bagi narapidana dengan penilaian resiko rendah akan dipindahkan ke Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir sebagai pusat open camp sehingga akan mengurangi kepadatan pada Lapas dan Rutan lainnya.
- Pembangunan blok hunian pada lembaga Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode 2022-2023

Tahun	Satuan Kerja	Pembangunan/ Renovasi	Penambahan Kapasitas
2022	Lapas Kelas I Tangerang	Blok Hunian C	250
		Blok Hunian D	250

	Lapas Kelas IIA Cilegon	Blok Mas Security	169
2023	Lapas Kelas I Tangerang	Blok Hunian J2	240
		Blok Hunian J4	240
Total			1.149

2. Pembinaan dan Revitalisasi Pemasyarakatan

a) Pembinaan keterampilan Bersertifikat

Pelaksanaan pembinaan keterampilan bersertifikat kepada WBP melalui pelatihan keterampilan di bidang agribisnis, manufaktur dan jasa. Adapun jumlah WBP yang telah mengikuti pelatihan keterampilan bersertifikat di tahun 2023 berjumlah 313 WBP.

b) Rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba

2022		2023	
Medis	Sosial	Medis	Sosial
220	820	170	480
1040		650	

c) Pembinaan narapidana teroris

2022			2023		
Napiter	Belum ikrar	Sudah ikrar	Napiter	Belum ikrar	Sudah ikrar
9	7	2	10	6	4

d) Pelaksanaan paska rehabilitasi pemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan

Selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan 45 pembinaan

e) Pelaksanaan asimilasi

Selama periode tahun 2022 hingga tahun 2023 telah dilaksanakan total 2.150 total asimilasi

3. Kondisi UPT Pemasyarakatan di Wilayah Banten

Terdapat UPT dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan membutuhkan dukungan anggaran, diantaranya:

a) Lapas KLA IIA Serang

- Peninggian tembok/ pagar keliling Lapas;
- Renovasi blok hunian guna penambahan kapasitas hunian;
- Renovasi Gedung bimbingan kerja dan aula, guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan WBP

b) Bapas KLA IIA Ciangir

- Hingga saat ini apas Kelas II Ciangir belum memiliki gedung

c) Rupbas KLA II Serang

- Kebutuhan anggaran sewa tempat (darat dan laut);
- Kebutuhan sarana pengangkut alat berat;
- Kebutuhan anggaran operational pemeliharaan basan/ baran;
- Kebutuhan pembangunan Gedung kantor Rupbanas dikarenakan status Gedung Rupbanas saat ini milik BMN Rutan Kelas IIB Serang.

4. Strategi Peningkatan Layanan Paspor

Data layanan paspor yang sudah dilakukan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah banten berjumlah 93.835 layanan dengan pembagian 90.403 layanan kantor dan 3.432 jemput bola. Adapun izin

tinggal yang sudah dikeluarkan oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Banten berjumlah 10.854 izin tinggal dan menolak 412 izin tinggal. Terkait Kerjasama yang sudah dilakukan dalam kegiatan layanan keimigrasian adalah:

- a) Mall pelayanan publik dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Cilegon dan Pemerintah Kota Tangerang (on progress).
 - b) Program immigration corner di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Bina Nusantara.
 - c) Unit layanan paspor dan gerai layanan paspor di Mall WTC Serpong dan Tangcity Mall Kota Tangerang.
5. Strategi Peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM
 - a) Fasilitas pembentukan produk hukum daerah
 - b) Optimalisasi layanan administrasi hukum umum di wilayah
 - c) Peningkatan kualitas layanan kekayaan intelektual
 - d) Penegakan dan pemajuan HAM
 6. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
 - a) Fasilitas bantuan hukum dan penyuluhan hukum di wilayah
 - b) Pelaksanaan penyuluhan hukum pada tahun 2023
 - c) Mendorong terwujudnya Desa/ Kelurahan Sadar Hukum
 7. Pengawasan Orang Asing dan Kerjasama Keimigrasian
 - a) Pengawasan, intelijen, operasi gabungan dan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) tahun 2023 telah terlaksana sejumlah kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian, yaitu:

TIM PORA	7	319 kegiatan
Pengawasan	232	
Intelijen	29	
Operasi gabungan	5	
TAK	48	

- b) Kerjasama pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan orang asing
 - Membentuk TIM PORA dan melaksanakan operasi gabungan pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota serta tingkat kecamatan;
 - Memanfaatkan APOA JAWARA dan bekerja sama dengan pihak hotel/ penginapan untuk melaporkan orang asing yang menginap, Adapun laporan yang sudah diterima adalah:

WNA (Stay)	Jumlah Hotel/ Penginapan
882	77
51	38
54	43
987	158

- Pelaksanaan pemeriksaan orang asing yang telah masuk ke wilayah Indonesia dengan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Karantina Kesehatan Pelabuhan.

IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

a. Bidang Anggaran

1. Alokasi anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2023

- a) Anggaran pada peradilan umum Mahkamah Agung RI berasal dari dua DIPA unit Eselon 1, yaitu DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dan DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Satuan Kerja	DIPA 01	DIPA 03
PN. Rangkasbitung	42,54%	50,61%
PN Banten	51,09%	53,86%
PN Tangerang	54,20%	52,53%
PN Pandeglang	50,47%	53,03%
PN Serang	48,88%	35,59%

- b) Adapun pagu anggaran di tahun 2024 dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Satuan Kerja	Pagu	
	DIPA 01	DIPA 03
Pengadilan Tinggi Banten	23.954.331.000	176.444.000
Pengadilan Tinggi Tangerang	22.854.415.000	474.720.000
Pengadilan Tinggi Serang	19.788.600.000	611.940.000
Pengadilan Tinggi Pandeglang	5.877.055.000	142.100.000
Pengadilan Tinggi Rangkasbitung	4.902.199.000	104.840.000

b. Bidang Pengawasan

1. Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Banten per 13 Juli 2023

Jenis	Sisa Tahun lalu	Masuk Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Perkara Belum Putus
Perdata	13	205	193	25
Pidana	6	99	97	8
Tipikor	5	31	36	0

2. Keadaan perkara di wilayah Pengadilan Negeri se-wilayah Banten

B. Pengadilan Negeri Tangerang				
Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Sisa Perkara
Perdata	1086	1347	1360	1073
Pidana	3318	981	1002	3297
Jumlah	4404	2328	2362	4370

Pengadilan Negeri Pandeglang					
Perkara		Sisa Tahun Lalu	Sisa Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Sisa Perkara
Perdata	Gugatan	14	16	16	14
	Permohonan	1	18	18	1
	Gugatan Sederhana	0	6	6	0
Pidana	Biasa	41	139	116	64
	Anak	0	3	3	0

	Pra Peradilan	0	1	1	0
	Cepat	0	3	3	0
	Singkat	0	0	0	0
	Tilang	0	863	823	0
	Jumlah	55	1049	1026	78

Pengadilan Negeri Serang					
Perkara		Sisa Tahun Lalu	Sisa Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Sisa Perkara
Perdata	Gugatan	68	83	80	3
	Gugatan Sederhana	18	36	40	4
	Permohonan	7	366	344	32
PHI		29	63	49	43
Pidana	Biasa	207	523	542	188
	Anak	5	28	30	3
	Pra Peradilan	0	11	11	0
	Cepat	0	1	1	0
	Lalu Lintas	0	14.353	14.353	0
Tipikor		28	23	38	13
Jumlah		362	15.487	15.478	286

Pengadilan Negeri Pandeglang					
Perkara		Sisa Tahun Lalu	Sisa Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Sisa Perkara
Perdata	Gugatan	13	14	10	17
	Gugatan Sederhana	0	1	1	0
	Permohonan	0	37	32	5
Pidana	Biasa	10	152	108	54
	Anak	0	5	3	2
	Praperadilan	0	0	0	0
	Cepat	0	1	1	0
	Lalu Lintas	0	1.778	1.778	0
Jumlah		23	1.998	1.933	78

3. Keadaan perkara di wilayah Pengadilan Negeri se-wilayah Banten

Satuan Kerja	Nomor Perkara
Pengadilan Tinggi Banten	<ol style="list-style-type: none"> Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BTN (Kebapeanan) Nomor 7/PID.SUS/2023/PT.BTN (Perpajakan) Nomor 25/PID.SUS/2023/ PT BTN (Narkotika) Nomor 1/PID.SUS.ANAK/2023/PT BTN (Perlindungan Anak) Nomor 4/ PID.SUS.ANAK/2023/PT BTN (Membawa Senjata Tajam)
Pengadilan Negeri Serang	<ol style="list-style-type: none"> Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg An. Andi Soko Setiabudi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg An. Ir. Bambang Purnomor, M. Eng Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg An. Hernanto Wiryomijoyo alias Raden Hernanto

	4. Nomor 9 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg An. Ir. Muhammad Reza 5. Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg An. Ir. Fazwar Bujang, IMBAT 6. Nomor 853/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg An. Nikita Mirzani Binti Mawardi Alm 7. Nomor 477/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG – 484/Pid.Sus/2023/PN SRG a.n Amir Naderi, Dkk 8. Nomor 448/Pid.B/2023/PN SRG a.n Suhendi, S. Kep., Ners Bin H. Dul Hadi
Pengadilan Negeri Pandeglang	1. Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl a.n Alwi Husen Maolana 2. Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl a.n Riko Arizki 3. Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pdl a.n Yangto 4. Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Pdl a.n Anam Supriyadi dkk 5. Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pdl a.n Uci Sanusi

4. Keadaan Eksekusi Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Banten

Satuan Kerja	Telah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
Pengadilan Negeri Tangerang	24	0
Pengadilan Negeri Serang	604	142
Pengadilan Negeri Pandeglang	-	5
Pengadilan Negeri Rangkasbitung	1	-

V. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

a. Bidang Anggaran

1. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten dan Pengadilan Agama yang berada di bawahnya pada tahun 2023 mengelola anggaran dengan total seluruhnya sebesar Rp60.400.713.000. dimana anggaran tersebut hingga Semester I Tahun 2023 telah direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentasi Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	48.028.272.000	28.683.453.171	59,8%
Belanja Barang	10.794.202.000	6.710.860.578	62,43%
Belanja Modal	155.000.000	144.728.000	96,4%

2. Program penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berasal dari unit organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) senilai Rp1.468.239.000. Adapun realisasinya adalah:

Kegiatan Belanja Barang	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentasi Realisasi Anggaran
Pos Bantuan Hukum	397.690.000	185.471.500	46,6%
Pembebasan Biaya Perkara	348.999.000	192.410.300	55,3%
Sidang Di luar Gedung	372.750.000	207.217.600	55,59%
Layanan Sidang Terpadu	205.800.000	29.170.000	14,17%
Peningkatan Manajemen Peradilan	143.000.000	83.449.000	58,36%

3. Dalam hal prioritas anggaran, PTA Banten berupaya mengoptimalkan anggaran pada kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA Banten yang merupakan salah satu tugas dan fungsi PTA Banten.

4. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 PTA Banten dan Pengadilan Agama se Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp67.361.223.000 dengan rincian sebagai berikut:

a) Program Dukungan Manajemen yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01) sebesar Rp65.466.870 dengan rincian:

Satuan Kerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
PTA Banten	11.018.845.000	2.599.647.000	-
PA Serang	8.735.345.000	1.299.777.000	-
PA Tigaraksa	10.108.871.000	1.178.224.000	-
PA Tangerang	7.619.095.000	1.142.233.000	-
PA Cilegon	2.640.394.000	1.167.523.000	-
PA Rangkasbitung	2.824.519.000	1.101.751.000	-
PA Pandeglang	3.018.291.000	11.012.355.000	-
Jumlah	45.965.360.000	19.501.501.000	-

b) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang berasal dari unit organisasi Direktorat Jenderal Peradilan Agama (DIPA 04) sebesar Rp1.894.353.000 dengan rincian nilai alokasi data terkait kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan di Pengadilan Tinggi Banten sebesar Rp143.000.000. Adapun terkait alokasi dana pada Pengadilan Agama se wilayah Banten, rinciannya adalah:

Satuan Kerja	Pos Bantuan Hukum	Pembebasan Biaya Perkara	Sidang Diluar Gedung	Layanan Sidang Terpadu
PA Serang	82.500.000	65.000.000	150.750.000	248.661.000
PA Tigaraksa	80.000.000	175.000.000	150.000.000	25.000.000
PA Tangerang	80.000.000	30.000.000		
PA Cilegon	50.000.000	47.252.000	95.000.000	25.000.000
PA Rangkasbitung	50.000.000	65.000.000	177.000.000	
PA Pandeglang	55.190.000	100.000.000		

5. Berdasarkan pagu indikatif tersebut di atas, sebagaimana Rencana Startegis yang ditetapkan, Tahun 2024 menargetkan skala prioritas untuk sasaran strategis:

a) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator terlaksananya perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan rencana strategisnya yaitu:

- Rencana strategis prodeo yaitu melakukan Kerjasama dengan pihak terkait dan memberikan informasi yang jelas melalui website serta akun media sosial lainnya;
- Rencana strategis Posbakum yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang akan bekerjasama dengan pengadilan;
- Rencana strategis sidang keliling yaitu melakukan Kerjasama dengan pihak terkait desa ataupun kelurahan.

b) Peningkatan sarana dan prasarana baik pada pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan maupun internal satuan kerja, diantaranya dengan melengkapi sarana dan prasarana berupa fasilitas bagi

penyanggah disabilitas agar mereka merasa nyaman dan terlayani dalam proses berperkara dan sarana prasarana penunjang pelayanannya.

b. Bidang Pengawasan

1. Rekapitulasi data perkara pada Pengadilan Tinggi Agama se wilayah Banten sampai dengan Juli 2023 adalah:

Satker	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Jumlah	Sisa 2023
PA Serang	184	2387	2571	139	1794	1934	637
PA Pandeglang	38	1012	1050	51	791	842	208
PA Rangkasbitung	0	886	886	37	721	758	128
PA Tangerang	98	2043	2141	140	1631	1771	370
PA Tigaraksa	663	4062	4725	260	3609	3869	856
PA Cilegon	68	484	552	56	434	490	62
Total	1.051	10.874	11.925	683	8.981	9.664	2.261

2. Rekapitulasi perkara berdasarkan jenis perkara pada Pengadilan Tinggi sewilayah Banten sampai dengan Juni 2023

Satker	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh	Pembatalan Perkawinan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Pengesahan Anak	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali
PA Serang	2	0	0	1	313	1481	8	3	0	15	0
PA Pandeglang	0	0	0	1	120	652	1	0	0	3	0
PA Rangkasbitung	0	0	0	0	134	716	1	1	0	9	1
PA Tangerang	6	0	0	0	329	1357	7	8	1	18	0
PA Tigaraksa	4	0	0	3	782	2619	25	11	0	60	0
PA Cilegon	1	0	0	0	106	309	0	4	0	2	0
Jumlah	13	0	0	5	1847	7134	42	27	1	107	1

Satker	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	Asal Usul Anak	Pengesahan Perkawinan	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Penetapan Ahli Waris	Lain-Lain
PA Serang	0	9	415	0	12	2	2	3	1	0	2	39	8
PA Pandeglang	1	1	114	0	11	0	0	0	0	0	1	7	1
PA Rangkasbitung	0	3	36	0	5	0	0	0	0	0	0	4	1
PA Tangerang	0	5	213	0	29	4	1	6	0	0	1	48	6

PA Tigaraksa	0	15	270	0	55	5	2	8	0	0	0	142	10
PA Cilegon	0	8	35	0	4	0	0	3	0	0	0	27	2
Jumlah	1	41	1083	0	116	11	5	20	1	0	4	267	28

3. Rekapitulasi data perkara eksekusi pada Pengadilan Tinggi se wilayah Banten dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Satuan Kerja Tkt Pertama	Jumlah Perkara	Belum Konfirmasi	Pelaksana Eksekusi				
			Belum Selesai	Sudah Eksekusi	Dam ai	Ca but	Dicoret dari Register
PA Serang	24	2	3	4	1	14	
PA Pandeglang	1	0	1				
PA Rangkasbitung	2	0				1	1
PA Tangerang	14	0	1	3	3	4	3
PA Tigaraksa	33	12	7	10		2	2
PA Cilegon	5	5					
Jumlah	79	19	12	17	4	21	6

4. Permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi sebagai berikut:

- a) Tidak adanya sumber daya yang memadai
Pengadilan tingkat pertama seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti jumlah hakim, pegawai administrasi, dan fasilitas. Kurangnya sumber daya ini dapat memperlambat proses eksekusi dan menyebabkan tumpang tindih dengan perkara lain yang harus ditangani.
- b) Keberatan dan banding
Pihak yang kalah dalam proses pengadilan seringkali mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Banding ini dapat memengaruhi proses eksekusi karena eksekusi mungkin ditangguhkan sampai putusan banding dikeluarkan. Jika putusan banding menyebutkan perlu adanya persidangan ulang di pengadilan tingkat pertama, maka eksekusi dapat tertunda lebih lama.
- c) Ketidakpastian hukum.
Beberapa ketidakpastian hukum dalam peraturan dan prosedur eksekusi dapat menyebabkan hambatan. Ketidakjelasan mengenai kewenangan dan tugas pelaksana eksekusi, prosedur penyitaan aset atau peraturan mengenai penangguhan eksekusi dapat menyulitkan proses eksekusi.
- d) Tindakan hukum yang diabaikan atau dihindari
Pihak yang dikenai putusan pengadilan mungkin tidak patuh atau berupaya menghindari pelaksanaan putusan tersebut. Mereka dapat menyembunyikan aset mereka atau melakukan tindakan lain yang menghambat proses eksekusi. Hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghalangi sepenuhnya pelaksanaan putusan pengadilan.
- e) Tidak adanya kerjasama
Dalam beberapa kasus, pihak yang diwajibkan untuk melakukan eksekusi tidak bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Mereka mungkin tidak memberikan akses ke aset yang perlu disita atau menghalangi proses eksekusi dengan berbagai cara. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam melaksanakan putusan pengadilan.

- f) Kendala teknis
 Dalam beberapa kasus, kendala teknis seperti kesalahan administrasi, kegagalan sistem komputer atau masalah lain dalam administrasi pengadilan dapat menghambat proses eksekusi.
5. Dalam rangka menerapkan reformasi birokrasi, profesionalisme dan integritas, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se wilayah Banten telah melakukan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM). Dimana da tiga Pengadilan Agama yang tyelah mendapat predikat WBK, yaitu: 1) Pengadilan Agama Tangerang; 2) Pengadilan Agama Tigaraksa; dan 3) Pengadilan Agama Serang.
 6. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme Hakim, diantaranya:
 - a) Diskusi hukum terkait yustisial yang dilakukan setiap satu bulan sekali guna meningkatkan profesionalitas serta kualitas para hakim;
 - b) Mengikutsertakan hakim dalam bimtek dan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat maupun eksternal serta pelatihan lainnay yang berkaitan dengan keperkaraan.
 7. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dukungan terhadap program prioritas Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jendral Peradilan Agama (Dirjen Badilog), PTA Banten telah merealisasikan layanan perkara melalui e-court dan layanan persidangan melalui e-ligitasi. Selain itu PTA Banten dan PA se wilayah Banten juga menghadirkan beberapa inovasi-inovasi pelayanan bagi masyarakat dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.

VI. Penjelasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

a. Bidang Anggaran

1. Pagu anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang awal tahun 2023 teralokasi pada dua petikan DIPA, yaitu: DIPA 01 Pagu Anggaran Rp7.995.780.000 dan DIPA 05 anggaran Ro44.300.000. Dimana pembagiannya dipaparkan pada tabel di bawah ini:

DIPA 01	
Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	5.991.067.000
Belanja Barang	1.999.713.000
Belanja Modal	5.000.000
Jumlah Total	7.995.780.000

DIPA 05	
Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pengamanan Sidang	10.000.000
Posbakum	32.900.000
Prodeo	1.400.000
Jumlah Total	44.300.000

2. Realisasi anggaran DIPA 01 sampai dengan Semester I Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Semester I TAYL (2022)	Deviasi (%)
Belanja Pegawai	5.991.067.000	3.421.119.247	57,10	50,92	+6,82
Belanja Barang	1.999.713.000	958.667.547	47,94	41,93	+6,01
Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	100	100	-
Jumlah Total	7.995.780.000	4.384.784.794	54,84	49,24	+5,60

3. Realisasi anggaran DIPA 05 sampai dengan Semester I Tahun 2023

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Semester I YATL (2022)	Deviasi
Pengamanan Sidang	10.000.000	4.350.000	43,50	33,33%	+10,17
Posbakum	32.900.000	18.631.380	56,63	47,55	+9,08
Prodeo	1.400.000	-	-	-	-
Total	42.300.000	22.981.380	51,88	43,42	+8,46

4. Berdasarkan rencana startegis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha memiliki program prioritas (PRONAS) pada sasaran yang ketiga, yakni meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Penguatan akses peradilan ini tertuang pada dua Rincian Output, berupa:
 - a) Perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo);
 - b) Layanan pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Berdasarkan pagu indikatif tahun 2024 yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada DIPA 01 sebesar Rp7.994.030.000 yang terdiri dari 1) Belanja Pegawai sebesar Rp6.140.342.000; 2) Belanja Pegawai Rp1.803.588.000. kemudian untuk DIPA 05 sebesar Rp50.420.000 yang terdiri dari 1) Pengamanan Sidang Rp16.400.000; 2) Layanan Posbakum Rp33.000.000 dan Prodeo sebesar Rp1.020.000.
6. Rencana Strategis dan Program Skala Prioritas
 Dalam rangka optimalisasi kinerja realisasi anggaran akan dilakukan melalui rencana dan strategi sebagai berikut:
 - a) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal;
 - b) Mengidentifikasi dan melakukan percepatan kegiatan yang dapat segera dilakukan; serta
 - c) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

b. Bidang Pengawasan

1. Data perkara yang menonjol di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Selama tahun 2022 dan pertengahan 2023 adalah klasifikasi perkara pertanahan, secara rinci dipaparkan pada tabel di bawah ini (data hingga 12 Juli 2023):

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Keadaan Perkara	72 perkara	34 perkara
Perkara yang telah diselesaikan	59 perkara	21 perkara
Perkara yang tengah diselesaikan	13 perkara	13 perkara

2. Terkait strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengurangi beban atau tunggakan perkara adalah:

- a) Dengan melaksanakan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan tanggal 13 Maret 2014, yaitu "Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan". Adapun dalam perkara tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim membuat laporan yang menerangkan alasannya tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung;
- b) Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, tanggal 6 Agustus 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pada tanggal 10 Oktober 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik sesuai tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Adapun datanya akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Perkara yang diporses administrasi perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik	72 perkara	34 perkara
Perkara yang didaftarkan manual	0 perkara	0 perkara

3. Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan pengawasan eksekusi sebagai berikut:

- a) Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 jo. Putusan Nomor: 252/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021 jo. Putusan Nomor 231/K/TUN/202, Putusan Nomor 33 PK/TUN/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Nomor 025/Taktis/2022, tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum tetap, yang diajukan oleh Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA;

b) Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 jo. Putusan Nomor: 253/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021 jo. Putusan Nomor: 201/K/TUN/2022, tanggal 7 April 2022 jo.jo. putusan Nomor 28 PK/TUN/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Nomor 026/Taktis/2022, tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum tetap, yang diajukan oleh Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga menciptakan layanan pendukung dan juga aplikasi-aplikasi lain yang merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kadilan, yaitu:

a) Inovasi aplikasi

No	Uraian	Keterangan
1	#jaWara# Asisten Digital PTUN Serang	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi pencarian data peradilan Tata Usaha Negara Serang berbasis bot Whatsapp adalah program atau perangkat lunak <i>chatbot</i> yang dapat digunakan secara khusus dalam aplikasi perpesanan terenskripsi Whatsapp populer, baik yang dapat diakses oleh publik ataupun keperluan internal; Bertujuan membantu masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan data informasi perkara secara lebih cepat serta meningkatkan kecepatan pelayanan publik dan keterbukaan terkait pelayanan pengadilan.
2	Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan Elektronik	<p>Dalam rangka pencegahan covid-19, pelayanan PTSP menerapkan mekanisme '<i>touch less</i>' dengan menscan QR Code untuk mengakses layanan yang tersedia.</p>
3	Daftar Buku Tamu Elektronik	
4	Daftar Hadir Persidangan Elektronik 'e-attendance'	
5	Service Rating Elektronik	
6	SIMKARA	
7	EMPATI	Sistem aplikasi berbasis web untuk eksekusi mandiri badan/ pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan putusan peradilan administrasi
8	SIMISTI	Aplikasi berbasis web untuk administrasi pelayanan cuti pegawai
9	SIDAPAT	Sistem aplikasi bank data berbasisi web untuk unggah arsip digital dan laporan secara mandiri dari tiap unit kerja
10	SIMARJAN	Aplikasi berbasis web merupakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
11	SEMPURNA	Layanan komunikasi dengan petugas PTPS melalui beragam <i>channel</i> komunikasi (PTSP Online)

12	E-SURAT	Aplikasi sistem tata peruratan secara elektronik
13	PPID PTUNSRG	Sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dikelola sebagai dokumen informasi yang dimiliki oleh badan publik
14	E-Baskara	Pengajuan permohonan surat keterangan bebas perkara di PTUN Serang secara elektronik

b) Digitalisasi Salinan putusan PTUN Seran dari Bulan Februari sampai 12 Juli 2023

No	Jenis dan Tahun Perkara	Jumlah Perkara
1	Perkara Tahun 2012	2 perkara
2	Perkara Tahun 2013	49 perkara
3	Perkara Tahun 2014	48 perkara
4	Perkara Tahun 2015	60 perkara
5	Perkara Tahun 2016	55 perkara
6	Perkara Tahun 2017	46 perkara
7	Perkara Tahun 2018	25 perkara
8	Perkara Tahun 2019	80 perkara
9	Perkara Tahun 2020	65 perkara
10	Perkara Tahun 2021	86 perkara
11	Perkara Tahun 2022	51 perkara
12	Perkara Tahun 2023	15 perkara
13	Perkara limpahan dari PTUN Bandung	86 perkara
Jumlah		668 perkara

5. Sejak tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menggulirkan program pembangunan berupa pelebaran jalan Provinsi Banten pada ruas Jalan Syech Nawawai Albantani Kota Serang (Ruas Palima-Pakupatan). Dimana dikarenakan pelebaran jalan tersebut, sebagian lahan kantor Pengadilan tata Usaha Negara Serang terkena imbas pelebaran jalan seluas 555m². Namun hingga saat ini belum ada titik terang dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait penggantian lahan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Memang sampai saat ini lahan yang terkena pelebaran jalan tersebut belum digusur, namun dampaknya jalan di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terjadi penyempitan yang mengakibatkan rentan terjadi kecelakaan. Maka dari itu Pengadilan tata Usaha Negara Serang merasa perlu untuk menyampaikan hal tersebut kepada Komisi III DPR RI dengan harapan bisa memberikan solusi akan hal tersebut.

VII. Penjelasan Kepala BNNP Banten

a. Bidang Anggaran

1. Pagu anggaran BNN Provinsi Banten beserta jajarannya tahun 2023 dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Satker	Jumlah Anggaran	Bidang				
		Umum	Berantas	Rehab	P2M	Realisasi
BNNP Banten	9.493.620.000	7.249.473.000	1.186.730.000	472.350.000	585.067.000	4.725.927.760
BNNK Tangerang	1.940.546.000	1.309.632.000	50.000.000	195.869.000	195.869.000	1.062.048.229

BNNK Tangsel	2.500.262.000	1.826.419.000	50.000.000	233.789.000	390.045.000	1.170.810.503
BNNK Cilegon	1.843.671.000	1.213.936.000	73.550.000	148.140.000	390.045.000	938.285.936

2. Pagu anggaran tahun 2024

Satker	Pagu (Rp)
BNNP Banten	9.482.020.000
BNNK Tangerang Selatan	2.500.262.000
BNNK Cilegon	1.940.546.000
BNNK Tangerang	1.843.671.000
Total	15.766.499.000

3. Target PBNP Tahun 2024

Satker	Target BNPB (orang)	Potensi PBNP (Rp)
BNNP Banten	150	43.500.000
BNNK Tangerang Selatan	300	87.000.000
BNNK Cilegon	130	37.700.000
BNNK Tangerang	300	87.000.000
Total	880	255.200.000

4. Strategi P4GN BNN RI

a) Soft power approach

Pendekatan yang menitikberatkan pada aktivitas bidang rehabilitasi dan bidang P4GN

b) Hard power approach

Pendekatan yang menitikberatkan pada bidang pemberantasan, penegak hukum yang tegas dan terukur.

c) Smart power approach

Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal pada era digital, dalam rangka mendukung upaya P4GN

d) Cooperative power approach

Pendekatan yang menitik beratkan pada koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kebijakan untuk melaksanakan P4GN

5. Program prioritas nasional BNNP Banten dan BNNK Jajaran di tahun 2023

Prioritas Nasional	Target	Satuan
Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	20	Keluarga
Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa (Desa Bersinar)	8	Desa/ Kel
Advokasi Kebijakan Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba	8	Lembaga
SMP dan SMU Sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i>	1	Lembaga
Remaja Teman Sevaya Anti Narkotika yang Terbentuk	30	Orang
Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	8	Lembaga

6. Rencana Program Prioritas Nasional di Tahun 2024

Prioritas Nasional	Target	Satuan
Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	20	Keluarga
Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa (Desa Bersinar)	8	Desa/ Kel

Advokasi Kebijakan Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba	8	Lembaga
SMP dan SMU Sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i>	1	Lembaga
Remaja Teman Sevaya Anti Narkotika yang Terbentuk	30	Orang
Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	8	Lembaga

b. Bidang Pengawasan

1. Data tangkap kasus narkotika tahun 2022-2023 adalah:

Data Ungkap Kasus 2022	
Jumlah berkas perkara	22 berkas perkara
Jumlah tersangka	22 tersangka
Jumlah barang bukti	Sabu: 2.647.181 gram Ganja: 10.148.42 gram
Jumlah kerugian	Sabu: 2.647.287.000 Ganja: 50.742.100

Data Ungkap sampai Juli 2023	
Jumlah berkas perkara	15 berkas perkara
Jumlah tersangka	15 tersangka
Jumlah barang bukti	Sabu: 2.395,279 gram Ganja: 61.635 gram
Jumlah kerugian	Sabu: 2.395.270.000 Ganja 308.175.000

2. Jenis kasus yang menonjol periode tahun 2022 – 2023 (sampai Juli)

Jenis Kasus yang Menonjol	LKN	Tersangka	Bulan	Barang Bukti	Motif dan Sindikat	Status
Narkotika jenis sabu oleh Hakim PN Rangkasbitung	LKN/04-Berantas/V/2022/BNNP Banten	R, Y, D	Mei 2022	Sabu ± 20,634 gr	Medan – Rangkas	P-21
Ungkap kasus sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Pemuda Tangerang	LKN/02-Berantas/IV/2022/BNNP Banten	M, S, J, W, AS, IP	April 2023	486,06 gr	Aceh – Jabar (Bogor)	P-21
Ungkap kasus narkotika jenis ganja yang diedarkan oleh oknum TNI AD	LKN/006-NAR/V/2023/BNNP Banten	PL, N	Mei 2023	52,015 gr ganja	Aceh - Banten	Sidik
Ungkap kasus narkotika jenis sabu	LKN/008/NAR/VI/2023/BNNP Banten	A, IS	Juni 2023	1.312.486 gr sabu	Aceh – Jabar (Depok)	Sidik

3. Pelaksanaan asesmen terpadu

Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun 2022		
Satuan Kerja	Target	Realisasi
BNNP Banten	20	100
BNNP Cilegon	6	7

Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun 2023 (Januari-Juli)		
Satuan Kerja	Target	Realisasi
BNNP Banten	46	38
BNNP Cilegon	3	0

4. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020
 - a) Penerbitan Perda Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2019
 - b) Pembentukan tim terpadu dengan P4GN Provinsi Banten
 - c) Penerbitan Perda Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023
 - d) Penerbitan Nota Kesepahaman Forkopimda Kota Cilegon tentang Rencana Aksi P4GN
 - e) Pembuatan Pelaporan B06 dan B12 pada masing-masing instansi vertikal dan OPD Provinsi/ Kota/ Kabupaten
 - f) Deklarasi Lapas Bersinar
 - g) Deklarasi Kampus Bersinar
 - h) Deklarasi Sekolah bersinar
 - i) Sosialisasi bahaya narkoba dan tes urin.

5. Sinergitas dan koordinasi yang dilakukan oleh BNNP Banten

Instansi	Jenis Kerjasama yang Dilakukan
Polda Banten	TAT, pemetaan Jaringan, Ungkap Perkara
Kejaksaan	Percepatan Berkas Perkara
Lapas	Pelayanan Rehab, lapas Bersinar, Ungkap Jaringan Narkoba di Lapas
Bea Cukai	Ungkap Perkara
PT. Angkasa Pura	Ungkap Perkara
Imigrasi	Ungkap Perkara Tersangka Orang Asing
PT. ASDP	Ungkap Perkara di Pelabuhan
TNI	Ungkap Perkara
Pemda	Rencana Aksi Daerah, Dukungan Program P4GN

6. Data Perjanjian Kerjasama dan Kesepahaman BNNP dan Jajaran tahun 2023

- a) Lembaga pendidikan: 31
- b) Lembaga pemerintahan: 14
- c) Swasta; 14

7. Rekomendasi

- a) Pembentukan BNNK baru
- b) Penambahan jumlah SDM pada BNNP dan BNNK jajaran
- c) Penambahan anggaran BNNP dan BNNK jajaran
- d) Pembangunan balai rehabilitasi untuk klien rawat inap di wilayah Banten.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 ke Provinsi Banten sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Banten, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mendukung Pengadilan Tinggi untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah dikeluarkan.
2. Komisi III DPR RI mendorong Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten untuk fokus terhadap pengawasan peredaran narkoba di dalam Lapas dan overcrowded yang terjadi di Lapas/ Rutan.
3. Komisi III DPR RI memberi perhatian terhadap barang sitaan yang berada pada Rubasan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten.
4. Komisi III DPR RI mendukung penambahan kuota bagi penerimaan anggota Polri di wilayah Polda Banten
5. Mendukung terjadinya sinergitas Kepolisian Daerah Banten, BNNP, Kejaksaan Tinggi Banten dalam upaya pemberantasan narkoba yang ada di Provinsi Banten
6. Meminta BNNP dan Aparat Penegak Hukum terkait agar tidak fokus dalam melakukan penindakan terhadap para korban, namun kepada pelaku, pengedar dan bandar narkoba

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Banten untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.

A-363

===HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN===